



Perkembangan Kurikulum Madrasah di Indonesia

Allamsyah Hadi Wijaya^{1✉}, Nur Ahid²

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri^{1,2}

e-mail : allamsyah0086@gmail.com¹, nurahid@iainkediri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangannya ada di dunia pendidikan yaitu kurikulum madrasah di Indonesia, dimulai dari era pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Analisis dilakukan dari berbagai macam literatur seperti perpres atau peraturan pemerintah, buku akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pendidikan yang ada di madrasah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum Indonesia merdeka, pendidikan agama Islam diselenggarakan melalui lembaga seperti masjid dan pesantren, yang mana terdapat jenjang pendidikan didalamnya seperti ibtidaiyyah, tsanawiyah, dan dayah sebagai cikal bakal jenjang aliyah. Setelah kemerdekaan, struktur bentuk kurikulum pendidikan madrasah mengalami pergeseran dari sistem mata pelajaran yang terpisah menjadi sistem yang terintegrasi. Perubahan ini ditandai dengan munculnya kurikulum berbasis konten serta pembaruan nomenklatur kurikulum, yang berkembang dari era SKB Tiga Menteri hingga era reformasi. Selain itu, diperkenalkan pula pendekatan pembelajaran baru seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Dalam upaya penguatan karakter peserta didik berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kurikulum madrasah di tingkat RA, MI, MTs, MA, dan MAK diarahkan pada pengembangan struktur yang bersifat otonom, dengan penekanan pada pembelajaran yang berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kata Kunci: Pendidikan, Kurikulum, Madrasah

Abstract

This study aims to examine the dynamics of developments in the world of education, namely the madrasa curriculum in Indonesia, starting from the pre-independence era to the reform era. The approach used is descriptive qualitative with library research methods. Analysis was conducted from various types of literature such as presidential regulations or government regulations, academic books, scientific journals, and policy documents relevant to education in madrasas. The research findings indicate that before Indonesia's independence, Islamic religious education was provided through institutions such as mosques and Islamic boarding schools (pesantren), which included educational levels such as ibtidaiyyah, tsanawiyah, and dayah as the precursor to the aliyah level. After independence, the structure of the madrasa curriculum shifted from a separate subject system to an integrated system. This change was marked by the emergence of a content-based curriculum and updates to the curriculum nomenclature, which developed from the Joint Decree of the Three Ministers to the reform era. In addition, new learning approaches were also introduced, such as the Active Student Learning Method (CBSA). In an effort to strengthen the character of students based on Pancasila values, the madrasa curriculum at the RA, MI, MTs, MA, and MAK levels is directed at developing autonomous structures, with an emphasis on project-based learning and extracurricular activities.

Keywords: Education, Curriculum, Madrasah

PENDAHULUAN

Kurikulum menjadi elemen kunci dalam sistem pendidikan, namun keberadaannya kerap kali kurang mendapatkan sorotan yang memadai. Padahal, kurikulum memegang peran strategis sebagai cerminan dari visi, misi, dan arah tujuan pendidikan nasional. Ia berfungsi sebagai medium utama untuk mentransfer nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran (Luthfi & Nursikin, 2024).

Sebagai inti dari sistem pendidikan, kurikulum menjadi landasan dalam menyusun proses pengajaran, pengembangan potensi siswa, hingga pencapaian hasil pendidikan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, madrasah memiliki posisi penting sebagai institusi formal yang memadukan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Namun, dalam realitasnya, kurikulum madrasah sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama akibat dinamika sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan yang terus berkembang (Achmad, 2021).

Secara ideal, kurikulum madrasah dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan spiritual dan pemahaman keislaman yang mendalam, serta mampu bersaing di tengah kompleksitas tantangan global. Sayangnya, masih ditemukan adanya ketimpangan antara desain kurikulum yang dirumuskan secara ideal dengan implementasi penerapan yang ada di lapangan. Sebagian madrasah masih cenderung menggunakan pembelajaran dengan pendekatan yang bersifat tekstual dan belum sepenuhnya mengadopsi metode pembelajaran kontekstual, kolaboratif, maupun penguatan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, literasi digital, dan kemampuan berkomunikasi secara global (Anam, 2024).

Berdasarkan temuan yang dikemukakan oleh Amini dan Nugroho, implementasi Kurikulum 2013 (K13) di lingkungan madrasah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan pelatihan bagi tenaga pendidik, kurang optimalnya fasilitas pembelajaran yang mendukung integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan iman dan takwa (IMTAQ), serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh Suryana mengungkapkan bahwa pendekatan kebijakan kurikulum yang diterapkan secara top-down sering kali menimbulkan kendala bagi para guru dalam mengadaptasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan lokal serta karakteristik unik peserta didik secara kontekstual.

Secara konseptual, pendekatan konstruktivistik dalam pengembangan kurikulum menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran serta pentingnya penyajian materi yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Dalam khazanah pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip tarbiyah, yang memposisikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses internalisasi nilai dan pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis dan komprehensif terhadap dinamika perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia, mencakup dimensi kebijakan, isi kurikulum, pelaksanaan, hingga implikasinya terhadap mutu pendidikan madrasah.

Perubahan kurikulum pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika sosial yang terus berkembang, yang dipengaruhi oleh faktor internal (seperti visi pendidikan nasional) maupun eksternal (seperti globalisasi dan perkembangan teknologi). Oleh karena itu, kurikulum dituntut untuk bersifat fleksibel, responsif, dan proaktif dalam menghadapi perubahan. Ketika kurikulum gagal merespons perubahan sosial secara tepat, maka hal tersebut berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan tantangan dan realitas kehidupan yang terus bergerak maju (Bahri, 2017).

Kurikulum merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Sejarah pendidikan nasional mencatat bahwa kurikulum senantiasa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Transformasi ini umumnya merupakan hasil dari proses evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu, memahami landasan dan arah dari proses analisis tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam menilai perkembangan pendidikan di Indonesia (Nurhasanah dkk., 2021).

Sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pendidikan, kurikulum memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Tanpa rancangan kurikulum yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan zaman, tujuan pendidikan akan sulit tercapai secara optimal. Dalam perjalanan sejarahnya, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk revisi dan adaptasi untuk menjawab tantangan perkembangan sosial, politik, budaya, dan teknologi, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas output pendidikan.(2018).

Madrasah, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, memiliki kedudukan yang sejajar dengan sekolah umum. Peran dari madrasah sangatlah penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai keislaman. Perbedaan yang sangat mendasar antara madrasah dan sekolah umum yaitu terletak pada latar belakang historis dan orientasi kelembagaannya. Sekolah umum merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan kolonial yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yang pada masa itu ditujukan bagi kalangan tertentu saja, terutama kelompok elite dan birokrat. Sementara itu, madrasah hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan yang diskriminatif, serta sebagai upaya memperjuangkan akses pendidikan bagi umat Islam yang terpinggirkan dalam sistem kolonial.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuwairah, 2023a) Pembahasan mengenai dinamika kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah selama kurun waktu 2013 hingga 2023 mengindikasikan bahwa Kurikulum 2013 telah mengalami berbagai bentuk penyesuaian sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Dalam implementasinya, struktur mata pelajaran PAI di madrasah terbagi ke dalam empat rumpun utama yang penyusunannya mengacu pada regulasi resmi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, sebagai bagian dari kewenangan Kementerian Agama. Pembagian ini mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam menjaga relevansi materi keagamaan dengan tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa substansi ajaran Islam tetap terintegrasi secara utuh dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, penelitian oleh (Adibah, 2025) menyoroti perkembangan kurikulum madrasah pada periode pasca-kemerdekaan, dengan fokus pada latar belakang historis dan kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa tersebut. Penelitian lain dari (Praptiningsih, 2019) menguraikan secara lebih luas perjalanan historis madrasah di Indonesia, mulai dari fase kemunculannya, kebijakan-kebijakan pendidikan yang menyertainya, hingga keberadaannya di era penjajahan dan masa Orde Baru.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari perkembangan kurikulum madrasah, hingga saat ini, kajian yang secara menyeluruh dan mendalam memetakan evolusi kurikulum madrasah sejak awal kemunculannya hingga memasuki era reformasi dalam satu kerangka analisis yang terpadu masih jarang ditemukan. Menjawab kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah sintesis historis yang komprehensif mengenai dinamika transformasi kurikulum madrasah di Indonesia. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada penelusuran perubahan kebijakan, pergeseran paradigma pedagogis, serta analisis atas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum di lingkungan madrasah dari masa ke masa. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan arah pengembangan kurikulum madrasah yang adaptif terhadap dinamika zaman, tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi utama madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai strategi utama dalam pengumpulan serta analisis data. Data dikumpulkan dari 22 sumber literatur utama yang terdiri dari artikel ilmiah nasional terakreditasi, buku akademik, dan dokumen resmi pemerintah terkait kurikulum madrasah di Indonesia. Pemilihan literatur mengikuti tiga kriteria penting.

Pertama, validitas dan kredibilitas sumber, yang meliputi jurnal ilmiah terakreditasi minimal pada level SINTA 4, karya ilmiah bereputasi dengan nomor DOI dan ISSN, serta dokumen resmi seperti Keputusan Menteri Agama yang menjadi acuan regulasi. Kedua, relevansi isi, yakni literatur yang secara eksplisit membahas perkembangan kurikulum madrasah baik dari perspektif sejarah maupun konteks pendidikan modern. Ketiga, rentang waktu penerbitan yang difokuskan pada publikasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2015–2025) untuk memastikan keterkinian informasi, sekaligus tetap mempertimbangkan literatur historis penting sejak 2007 sebagai landasan konseptual. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan tujuan menelaah pola kebijakan, dinamika implementasi, serta perubahan struktur dan konten kurikulum madrasah dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kurikulum Madrasah

Secara etimologis, istilah "madrasah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tempat untuk belajar." Dalam konteks pendidikan di Indonesia, madrasah umumnya diketahui seperti institusi pendidikan formal berbasis Islam, yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembelajaran. Meski memiliki orientasi keislaman serupa, madrasah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pesantren. Perbedaan tersebut terletak pada struktur kurikulum, metode pengajaran, serta sistem kelembagaan yang digunakan. Pesantren, misalnya, identik dengan keberadaan unsur-unsur tradisional seperti kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning), yang tidak menjadi elemen utama dalam sistem pendidikan madrasah. (Nasir, 2017).

Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari akar masyarakat, madrasah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial. Keberadaan madrasah umumnya didirikan dan dikelola oleh komunitas lokal, menjadikannya sebagai pilar pendidikan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat (Ghofur dkk., 2024). Dalam praktiknya, madrasah seringkali beroperasi pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, dengan fokus pada integrasi antara pengajaran pendalamannya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan umum, yang dilandaskan pada pedoman ajaran Islam.

Di sisi lain, terdapat tipe madrasah yang secara khusus menitikberatkan kurikulumnya pada pendidikan keagamaan yang bersifat intensif, yaitu madrasah diniyah. Lembaga ini umumnya tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren tradisional, dan banyak dirintis oleh lulusan pesantren yang berkomitmen untuk menjaga serta melestarikan tradisi intelektual Islam klasik. Kurikulum madrasah diniyah biasanya berfokus pada pengajaran literatur klasik Islam atau *kitab turats* (kitab kuning), yang mencakup beragam disiplin ilmu seperti Aqidah (Tauhid), Bahasa Arab, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Hadis, Tafsir, hingga Tasawuf. Fokus pembelajarannya tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter spiritual dan moral melalui pendekatan pembelajaran khas pesantren seperti sorogan, bandongan, dan halaqah (Sidiq, 2018).

Madrasah yang memiliki struktur kurikulum yang lebih terorganisir dan materi ajar yang lebih beragam umumnya termasuk dalam kategori madrasah formal yang telah mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah. Pengakuan ini memberikan legitimasi administratif yang memungkinkan para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dalam lintasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, madrasah berkembang dalam dua bentuk utama: madrasah diniyah dan madrasah non-diniyah. Madrasah diniyah secara khusus mengarahkan seluruh kurikulumnya pada pendidikan agama Islam secara mendalam, sedangkan madrasah non-diniyah merupakan lembaga yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama dalam komposisi yang bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lembaga masing-masing (Kosim, 2007).

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, madrasah memiliki kedudukan formal dalam struktur pendidikan nasional. Di samping menyampaikan mata pelajaran

umum sesuai dengan kurikulum nasional, madrasah juga menawarkan pelajaran agama Islam seperti Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, serta Al-Qur'an dan Hadis, sebagai bagian integral dari kurikulumnya (Arifai, 2018).

Sejarah keberadaan madrasah di Indonesia dapat dilacak sejak awal abad ke-20, yang menandai fase awal institusionalisasi pendidikan Islam formal di Nusantara. Salah satu madrasah tertua yang tercatat adalah Madrasah Diniyah Labai al-Yunusiyah yang didirikan di Sumatera pada tahun 1905. Di wilayah Kesultanan Surakarta, berdiri pula Madrasah Mambaul Ulum sebagai bagian dari gerakan pendidikan Islam yang berkembang pesat. Perkembangan ini tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan menyebar ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Beberapa tokoh penting turut andil dalam mendirikan madrasah-madrasah yang berpengaruh, seperti Syekh Abdul Karim Amrullah yang merintis Madrasah at-Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1907. Selanjutnya, Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Madrasah Adabiyah pada tahun 1908, disusul oleh H. Abdul Somad yang merintis Madrasah Nurul Iman di Jambi. Lembaga-lembaga ini menjadi cikal bakal dari perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia yang kemudian mengalami transformasi seiring dinamika sosial, politik, dan pendidikan nasional.

Pertumbuhan madrasah di kawasan Jawa mengalami akselerasi signifikan, terutama dipengaruhi oleh kuatnya tradisi pendidikan pesantren yang dibangun dan dikembangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sejak pasca tahun 1912. Dalam fase ini, struktur kelembagaan madrasah mulai terbentuk secara lebih sistematis, ditandai dengan munculnya berbagai jenjang pendidikan, seperti Madrasah Awwaliyah (tingkat dasar awal), Ibtidaiyah (setingkat SD), Tsanawiyah (setingkat SMP), hingga jenjang lanjutan seperti Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. Sejak sekitar tahun 1919, pendirian madrasah dengan jenjang-jenjang tersebut mulai meluas, mencerminkan upaya penyusunan sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan berjenjang sesuai kebutuhan zaman. Di tahun yang sama, organisasi Muhammadiyah juga turut menginisiasi pembaruan dalam sistem pendidikan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan madrasah yang mengintegrasikan kurikulum keislaman dan pendekatan pendidikan modern yang diadopsi dari sistem kolonial Belanda. Muhammadiyah mengembangkan model Madrasah Plus yang mencakup jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, dan Muballighin.

Selain dua organisasi besar tersebut, Al-Irsyad juga turut memberi kontribusi terhadap sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Didirikan pada tahun 1913, Al-Irsyad mengembangkan beberapa jenjang pendidikan madrasah seperti Awwaliyah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassus, yang menekankan pada penguatan kurikulum keagamaan dan penyelarasan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat urban dan intelektual Muslim saat itu (2017).

2. Pendidikan Agama sebelum Kemerdekaan

Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, kurikulum madrasah di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup dinamis, mengikuti perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat pada setiap zamannya. Perubahan ini tercermin dalam pergeseran struktur serta muatan kurikulum, yang disesuaikan dengan tuntutan dan konteks historis pada masing-masing periode.

1) Masa Kerajaan Islam (13 M - 16 M)

Pada fase awal, pendidikan Islam di Indonesia berlangsung dalam bentuk non-formal melalui lembaga seperti masjid dan pondok pesantren. Saat itu, belum terdapat sistem kurikulum yang baku atau pembagian jenjang pendidikan yang terstruktur secara resmi. Meskipun demikian, dalam praktiknya telah terbentuk tiga tingkatan belajar, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Proses pembelajaran umumnya dilakukan dengan metode halaqah dan sistem hafalan, menggunakan bahan ajar yang meliputi pengenalan huruf hijaiyah hingga khatam Al-Qur'an, serta pengajaran dasar-dasar ajaran Islam seperti tata cara ibadah dan prinsip-prinsip rukun Islam. Pada tingkat menengah, materi berkembang mencakup ilmu tajwid, pembacaan Barzanji, dan pengajian kitab-kitab klasik dengan

metode sorogan, wetonan, dan halaqah. Sedangkan pada tingkat lanjutan, metode pengajaran relatif sama, namun dengan cakupan materi yang lebih mendalam seperti tata bahasa Arab, ilmu kalam (ushuluddin), fikih ibadah, tasawuf, tafsir, dan bahkan pembahasan tentang tarekat (Sabarudin, 2015).

2) Masa Kerajaan Islam (17 M - 19 M)

Surau Memasuki periode Kerajaan Islam (abad ke-17 hingga ke-19), lembaga pendidikan Islam mulai berkembang dengan bentuk dan fungsi yang lebih sistematis. Institusi seperti *surau* dan *meunasah* setara dengan pendidikan dasar (ibtidaiyah), *rangkang* sebanding dengan jenjang menengah pertama (tsanawiyah), dan *dayah* mencerminkan jenjang menengah atas (aliyah) atau bahkan tingkat perguruan tinggi (jami'ah). Kurikulum yang diterapkan pada masa ini terbagi menjadi kurikulum tematik dan kurikulum inti. Pada jenjang dasar, pembelajaran mencakup kemampuan membaca dan menulis huruf Arab, pemahaman dasar ilmu agama, sejarah Islam, serta pengantar bahasa Melayu. Pada jenjang yang lebih tinggi, materi diperluas mencakup bidang-bidang seperti bahasa Arab, tauhid, tasawuf, etika, ilmu faraid (waris), geografi, sejarah, matematika, ilmu pemerintahan, dan astronomi.

3) Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang (sebelum 1909 di Jawa)

Sistem Pendidikan Bumi Putera yang berkembang di lingkungan Keraton dan Pertapaan menjadi salah satu model lembaga pendidikan Islam yang khas pada masa itu. Namun, kurikulum yang diterapkan pada sistem ini belum memiliki struktur yang terstandarisasi atau baku, karena pendidikan yang bersifat keras ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, sementara pendidikan di keraton hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. Materi pembelajarannya juga terbilang sederhana, lebih menitikberatkan pada bacaan Al-Qur'an dan pengenalan dasar-dasar Islam. Selain itu, terdapat pula sistem pendidikan di surau atau langgar yang masing-masing memiliki kurikulum tersendiri untuk setiap mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran di lembaga-lembaga ini umumnya mencakup membaca Al-Qur'an, mempelajari prinsip-prinsip dasar agama Islam, serta adat istiadat setempat, yang diajarkan dengan metode ceramah, hafalan, dan pembacaan. Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang masih menerapkan kurikulum tersendiri dengan metode sorogan, wetonan, dan halaqah, telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Aiwan & Rehani, 2022). Kurikulum di pesantren tetap memfokuskan pada pengajaran ilmu tarekat, bahasa Arab, tasawuf, fikih, dan tafsir.

4) Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang (sebelum 1909 di Sumatera)

Tidak seperti di Jawa, sistem pendidikan Islam di wilayah Sumatera pada masa yang sama menunjukkan karakteristik tersendiri yang khas. Di kawasan ini berkembang model pendidikan Madrasah Diniyah dengan struktur jenjang yang cukup sistematis, meliputi tiga tingkat pendidikan. Jenjang pertama setara dengan Sekolah Dasar yang berlangsung selama empat tahun, dilanjutkan dengan jenjang menengah pertama setara SMP (empat tahun), serta jenjang lanjutan atas yang setara dengan SMA, juga berdurasi empat tahun. Masing-masing jenjang telah mengakar dalam masyarakat dengan sebutan lokal yang dikenal luas, mencerminkan integrasi antara struktur formal dan nilai-nilai tradisional Islam di Sumatera. Kurikulum yang dikenal sebagai Kurikulum 14 ini mengorganisasikan disiplin ilmu ke dalam tiga tingkatan tersebut. Pendekatan baru yang diterapkan dalam kurikulum ini meliputi metode langsung, latihan, ceramah, serta teknik induktif-deduktif. Dari sisi materi, pada jenjang dasar, selain pengetahuan agama dan bahasa Arab, juga diajarkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulum (Arifin Ritonga, 2022).

3. Pendidikan Agama Pasca Kemerdekaan

Tiga fase penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi menjadi landasan utama bagi perbedaan arah kebijakan negara terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pengakuan formal terhadap eksistensi madrasah diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan

Pengajaran di Sekolah, serta Peraturan Bersama Dua Menteri yang disahkan pada 20 Januari 1951. Sejak saat itu, madrasah terus berkembang secara berkelanjutan hingga memasuki era Reformasi.

1) Kurikulum Madrasah Masa Orde Lama (1945-1965)

Pada masa tersebut, struktur kelembagaan pendidikan madrasah terbagi ke dalam beberapa jenis, seperti Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) yang menyelenggarakan pendidikan selama lima tahun, serta Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) dengan durasi pendidikan empat tahun. Beragam format ini mencerminkan upaya pengorganisasian pendidikan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan tenaga pendidik dan hakim agama pada era itu. Selain itu, terdapat struktur madrasah yang meliputi tingkat dasar (enam tahun), tingkat menengah pertama (empat tahun), dan tingkat menengah atas (empat tahun). Kurikulum pada masa tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, melainkan masih diklasifikasikan ke dalam beberapa rumpun akademik. Meskipun SGAI telah mulai memadukan unsur pelajaran umum dan keagamaan, kurikulum SGHAI cenderung lebih komprehensif karena mencakup beragam mata pelajaran seperti sastra, ilmu pengetahuan alam, studi keislaman, serta pendidikan agama secara luas. Secara keseluruhan, kurikulum madrasah kala itu mencerminkan upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan antara muatan religius dan akademik di semua jenjang, setara dengan SD, SMP, dan SMA.

2) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (1966-1974)

Kurikulum Perubahan kurikulum madrasah pada periode Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1974, menunjukkan pergeseran pengaturan mata pelajaran. Di jenjang SD, porsi pelajaran agama mendominasi sebanyak 60% dari keseluruhan kurikulum, sementara pelajaran umum mengisi 40%. Pola yang sama juga berlaku di jenjang SMP dan SMA, di mana materi pelajaran agama menguasai 60% dan pelajaran umum 40% dari total kurikulum.

4. Madrasah Era Skb 3 Menteri Sampai Era Reformasi

1) Kurikulum Madrasah Masa Orde Baru (SKB 3 Menteri 1975-1984)

Pada periode tahun 1975 hingga 1984, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri melakukan perubahan signifikan terkait komposisi kurikulum madrasah. Pada masa ini, proporsi pelajaran agama ditetapkan hanya sebesar 30% pada jenjang SD, SMP, dan SMA, sedangkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) mendominasi dengan porsi mencapai 70% (Kosim, 2007).

2) Kurikulum Madrasah Era Orde Baru (SKB 2 Menteri 1984)

Dari segi kelembagaan, tidak ada perubahan besar selama pelaksanaan SKB Dua Menteri yang bertujuan mengadaptasi regulasi sebelumnya. Madrasah tetap beroperasi pada tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah dengan pengenalan nomenklatur kurikulum baru sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan. Kurikulum ini dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Isi yang dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran inovatif, yaitu Metode Belajar Siswa Aktif (MBA). Pada periode ini, mata pelajaran IPA menjadi pilihan, sementara kurikulum IPA menjadi program inti berdasarkan kebijakan tersebut.

3) Kurikulum Madrasah pada Masa Orde Baru (1987)

Selain itu, pada masa ini diperkenalkan juga Madrasah Aliyah Program Luar Biasa (MAPK) di jenjang SMA, sebagai pelengkap jenjang SD dan SMP. Meskipun mengalami perubahan mendalam, kurikulum tersebut masih berakar pada prinsip Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sebelumnya, mata pelajaran umum bersifat pilihan dan pelajaran agama menjadi fokus utama. Namun, pada kurikulum terbaru ini, proporsi mata pelajaran agama meningkat signifikan menjadi 70%, sementara mata pelajaran umum hanya 30%.

4) Kurikulum Madrasah pada Masa Orde Baru (1994)

Kurikulum madrasah kemudian bergeser dari pendekatan berbasis isi menuju pendekatan berbasis tujuan. Tanpa adanya program khusus, madrasah tetap melaksanakan pendidikan di jenjang

SD, SMP, dan SMA. Kurikulum 1994 mempertahankan pembagian porsi yang sama, yaitu 70% untuk mata pelajaran agama dan 30% untuk mata pelajaran umum, sehingga secara substansial tidak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam perjalanan perkembangannya, kurikulum ini sering digabungkan dengan kurikulum tahun 1975, 1984, dan 1994, namun perubahan yang terjadi tidak memberikan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan kurikulum terdahulu.

5) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2004)

Pembelajaran yang sebelumnya mengandalkan metode ceramah, hafalan, dan CBSA kini telah bergeser ke pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) serta CTL (Contextual Teaching and Learning) sebagai konsekuensi dari penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Proporsi muatan kurikulum berbasis kompetensi ini tetap mempertahankan komposisi 70% pelajaran agama dan 30% mata pelajaran lainnya, sebagaimana kebijakan sebelumnya.

6) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2006)

Komposisi muatan agama pada kurikulum ini konsisten sebesar 70%, sementara muatan pelajaran umum tetap 30%. Seiring perkembangan konsep pendidikan, penambahan teknik pembelajaran dilakukan dengan mengadopsi model inkuiiri dan berbagai strategi pembelajaran lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.

7) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2013)

Kurikulum 2013 (K-13) merupakan kurikulum nasional yang dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 dan telah diterapkan secara menyeluruh di berbagai jenjang pendidikan, termasuk madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama. Kurikulum ini bertujuan membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek kognitif, tetapi juga memiliki kreativitas, inovasi, produktivitas, serta karakter afektif yang kuat. Penerapan kurikulum ini dimulai pada Juli 2013, meskipun pada tahap awal hanya diterapkan di jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 dirancang untuk memberdayakan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa secara terpadu. Dalam konteks madrasah, implementasi K-13 berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Regulasi ini mengatur struktur kurikulum, alokasi waktu, serta strategi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik madrasah. Salah satu ciri khasnya adalah integrasi antara kurikulum nasional dan mata pelajaran keagamaan yang menjadi identitas madrasah, meliputi Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Kurikulum ini juga menekankan pendekatan ilmiah (*scientific approach*), penguatan pendidikan karakter, serta penggunaan penilaian autentik dalam mengevaluasi hasil belajar. Dengan demikian, madrasah diharapkan mampu mencetak lulusan yang seimbang antara kompetensi intelektual dan spiritual, serta siap menghadapi dinamika global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (Nuwairah, 2023b).

8) Kurikulum Madrasah Masa Reformasi (2021)

Kebijakan kurikulum madrasah pada masa implementasi Kurikulum Merdeka diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip fleksibilitas dan diferensiasi dalam proses pembelajaran, yang memungkinkan madrasah menyesuaikan metode dan materi sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka tetap mempertahankan ciri khas madrasah dengan memuat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab secara menyeluruh, namun dikembangkan dalam kerangka pembelajaran merdeka yang menonjolkan pendekatan berbasis proyek (P5-RA/P5-BK), penguatan karakter peserta didik, serta adaptasi yang responsif terhadap keunikan masing-masing madrasah. Kebijakan ini memberikan ruang yang luas bagi madrasah untuk berinovasi dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi siswa, sekaligus tetap menjaga identitas keislaman sebagai landasan utama pendidikan madrasah.

5. Bentuk Struktur Kurikulum Madrasah

Struktur kurikulum mencerminkan implementasi prinsip-prinsip kurikulum yang menekankan peran dan posisi aktif peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran pada suatu jenjang atau satuan pendidikan tertentu (Suradi dkk., 2013). Selain itu, struktur ini menggambarkan cara pengorganisasian materi pembelajaran dalam sistem pendidikan serta bagaimana beban belajar disusun dan dioperasionalkan selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah.

Pada madrasah yang menerapkan Kurikulum Mandiri, seperti Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), struktur kurikulum dirancang untuk mendukung pengembangan karakter profil Pelajar Pancasila. Struktur ini umumnya dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran ekstrakurikuler. Namun, dalam praktiknya, kedua komponen tersebut bisa diintegrasikan menjadi satu kesatuan pembelajaran yang menyeluruh, yang dapat diterapkan pada seluruh mata pelajaran di MI, MTs, MA/MAK, bahkan merangkul semua aspek perkembangan anak di tingkat RA.

Secara khusus, pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), struktur kurikulum terbagi ke dalam dua tahap, yakni tahap D untuk kelas VII dan VIII, serta tahap E untuk kelas IX. Dalam tahap ini, madrasah memiliki fleksibilitas untuk menyusun materi pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran intrakurikuler secara simultan maupun kombinasi, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Madrasah juga diberi kebebasan untuk memilih atau mengkombinasikan pendekatan mata pelajaran atau tema yang relevan, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan intrakurikuler sekaligus mendukung pengembangan karakter Pelajar Pancasila. Metode pembelajaran yang digunakan dapat bersifat kooperatif, di mana beberapa topik digabungkan untuk menguatkan satu tema yang diawasi melalui pembelajaran berbasis proyek (Menteri Agama RI, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan historis mengenai perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, dengan fokus pada dinamika kebijakan, perubahan struktur isi, serta pendekatan pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurikulum madrasah bukanlah sesuatu yang statis atau tetap, melainkan mengalami proses transformasi yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sosial-politik, kebijakan pendidikan nasional, serta kebutuhan umat Islam akan sistem pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Pada tahap awal, kurikulum madrasah bersifat informal dan berakar kuat pada tradisi pesantren serta aktivitas pengajaran di masjid. Seiring waktu, kurikulum tersebut berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur selama masa kolonial dan pascakemerdekaan melalui kebijakan-kebijakan strategis, seperti SKB Tiga Menteri dan penerapan Kurikulum 2013. Sepanjang sejarahnya, kurikulum madrasah terus berupaya menjaga keseimbangan antara muatan pendidikan agama dan pendidikan umum, sambil mengadopsi berbagai pendekatan pembelajaran modern mulai dari CBSA, PAIKEM, hingga Kurikulum Merdeka. Temuan utama dalam penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan kurikulum madrasah mengikuti pola sinkronisasi yang harmonis antara nilai-nilai keislaman dengan tuntutan globalisasi pendidikan. Ke depan, tantangan utama adalah merancang kurikulum yang fleksibel dan kontekstual, sekaligus mampu memperkuat karakter dan literasi spiritual peserta didik tanpa mengesampingkan daya saing akademik. Oleh karena itu, madrasah diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang menjaga dan melestarikan warisan keislaman, tetapi juga mampu berinovasi dan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H. (2021). Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 1(2), 246–261. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.130>
- Aiwan, A. & Rehani. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Anam, K., & Maimun. (2024). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah (Studi Kasus Di MA Dan SMK Miftahul Ulum Panyeppen Pamekasan). *Journal on Education*, 7(1).
- Arifai, A. (2018). Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah Dan Sekolah. *RAUDHAH*, 3(2).
- Arifin Ritonga, M. (2022). Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Perkembangan Kurikulum Madrasah Serta Dampak Positif Dan Negatifnya. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(2). <https://doi.org/10.47006/er.v5i2.12915>
- Asrofi, & Adibah, I. Z. (2025). PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA. *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(2).
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>
- Elisa. (2018). Pengertian, Peranan, dan Fungsi Kurikulum. *Jurnal Curere*, 1(02).
- Ghofur, A., Choiriyah, F., Nashrullah, M., Purwoko, B., & Budiyanto, B. (2024). Analisis Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Mi). *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 1128–1135. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3761>
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia. *Tadris*, 2(1).
- Luthfi, S. M., & Nursikin, M. (2024). Konsep Kurikulum Pendidikan dalam Pandangan Ibnu Sina dan James B. Macdonald. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Mentri Agama RI. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 tahun 2022*.
- Nasir, M. (2017). Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 11(24).
- Nurhasanah, A., Pribadi, R. A., & Nur, M. D. (2021). Analisis Kurikulum 2013. *Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri*, 7(2).
- Nuwairah, K. M. (2023a). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah 2013-2023 (Studi Di Madrasah Tsanawiyah). *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 23(2), 149–161. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v23i2.272>
- Nuwairah, K. M. (2023b). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah 2013-2023 (Studi Di Madrasah Tsanawiyah). *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 23(2), 149–161. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v23i2.272>
- Praptiningsih, P. (2019). Perkembangan Madrasah Di Indonesia. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(1), 87–107. <https://doi.org/10.54090/mu.32>
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *JURNAL TARBIYA*, 1(1).
- Sidiq, U. (2018). *Manajemen Madrasah* (1 ed.). CV. Nata Karya.
- Sukino. (2017). Pengembangan Kurikulum Madrasah Di Daerah Transisi. *TARBAWI*, 3(1).
- Suradi, A., Andrea, C., Cindika, P. A., Amanda, M., Eka, W., & Anggraini, L. I. (2013). Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah (MI). *AL IBTIDAIYAH: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1).